

Website Direktorat Jendral Aplikasi Informatika Sebagai Pendukung Ekosistem Digital Pemerintah: Perspektif Manajemen Sektor Publik

Ahmad Muhardin Hadmar¹, Dyah Mutiarin², Zuly Qodir³

^{1,2,3} Department of Government Affairs and Administration, Universitas Muhammadiyah
Yogyakarta, Yogyakarta

e-mail: ahmadmuhardin@gmail.com (penulis korespondensi)

Abstrak

Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika (Ditjen APTIKA) memiliki peran penting dalam transformasi teknologi informasi pemerintahan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak positif penggunaan website Ditjen APTIKA terhadap pengembangan teknologi informasi dalam konteks pelayanan publik. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan tinjauan naratif. Analisis data menggunakan tools NVivo 12 Plus dan Vosviewer untuk mengidentifikasi visualisasi jaringan kata kunci, serta teori Agile Governance sebagai dasar analisis. Hasil temuan menunjukkan bahwa tata kelola website Ditjen APTIKA mendukung pengembangan ekosistem data di Indonesia. Meskipun penetrasi internet meningkat cukup tinggi, namun hanya Pulau Jawa dan Sumatera yang menjadi pusat utama penggunaan internet. Sekitar 22% masyarakat Indonesia cenderung mengakses internet hanya untuk hiburan, yang menyebabkan penurunan nilai-nilai wawasan kebangsaan masyarakat. Pengembangan website APTIKA juga perlu memperhatikan ekosistem data yang menjadi fokus penting dalam transformasi layanan publik. Pengembangan tersebut melibatkan topik seperti literasi digital, perlindungan data pribadi, transformasi digital, dan penanganan hoaks COVID-19. Hasil penelitian ini dapat berimplikasi pada perumusan kebijakan, inovasi digital, dan peningkatan kualitas layanan website APTIKA.

Kata kunci: TIK, Website APTIKA, Ekosistem Digital, Layanan Publik

PENDAHULUAN

Pada era digital saat ini, pemerintah semakin bergantung pada teknologi informasi untuk menyediakan layanan yang efektif dan efisien. Selama dua dekade terakhir, proses digitalisasi pelayanan publik telah dimulai sebagai upaya untuk meningkatkan layanan sektor publik serta modernisasi sistem pemerintahan (Nielsen & Ali, 2021). Transformasi digital pemerintah yang memanfaatkan teknologi informasi juga menjadi sangat penting dalam mendorong implementasi kebijakan pemerintah digital secara langsung (Chung & Kim, 2019). Dalam konteks ini, konsep pemerintahan digital mencerminkan upaya pemerintah dalam menemukan solusi digital inovatif di bidang sosial, ekonomi, dan politik, dan memberikan dampak yang signifikan terhadap transformasi proses pengambilan keputusan (Alvarenga et al., 2020). Upaya ini sebagai langkah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas produksi layanan sektor publik dan pemberian layanan modernisasi sistem pemerintahan (Nielsen, 2019).

Menurut Correa-Ospina et al (2021), sektor publik telah mengalami transformasi digital yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Teknologi informasi dan komunikasi (ICT) telah membuka jalan bagi adanya interaksi baru antara pemerintah dan konstituenya. Selain itu, teknologi juga menjadi bagian integral dari infrastruktur sektor publik yang tangguh, dan

memiliki peran penting dalam mendorong inovasi berkelanjutan dan penciptaan nilai baik di sektor publik maupun swasta, serta memberikan manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan (Morte-Nadal & Esteban-Navarro, 2022). Teknologi ini membantu dalam keterbukaan pemerintah, meningkatkan akuntabilitas, dan meningkatkan kepercayaan publik melalui e-government (Mutar et al., 2022). Oleh karena itu, dengan terus mendorong inovasi dan adopsi teknologi yang tepat, sektor publik dapat mengambil manfaat maksimal dari e-government dan memberikan layanan publik yang lebih baik kepada konstituen mereka.

Sistem e-government merupakan salah satu aspek dari transformasi digital di sektor publik (Akbar et al., 2022). E-government sebagian besar merupakan kata kunci yang membawa perubahan dalam ruang lingkup pemerintahan digital (Mergel et al., 2019). Konsep ini memberikan layanan yang lebih baik dengan menggunakan *digital transformation* oleh otoritas publik yang berfokus pada penggunaan inovasi untuk mengumpulkan, mengirimkan, memproses, atau menganalisis data (Yuliantini, 2023). Transformasi digital dalam konteks e-government dapat membawa berbagai manfaat signifikan bagi masyarakat, seperti peningkatan efisiensi dalam penyediaan layanan publik, partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan, pengurangan birokrasi, peningkatan transparansi, dan pengurangan praktik korupsi. (Sidek & Ali, 2019). Sehingga hal tersebut diharapkan dapat memudahkan masyarakat dalam mengakses pelayanan public. Oleh karena itu, penerapan teknologi informasi yang baik dalam e-government dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi pemerintah dan masyarakat secara keseluruhan.

Konsep e-government diharapkan dapat memudahkan masyarakat dalam mengakses pelayanan publik. E-government menyiratkan pendekatan internal, yang telah diperluas dengan pandangan eksternal sebagai konsekuensi dari transformasi digital di sektor publik dan hubungannya dengan kepercayaan warga negara (Parra & Libaque-Saenz, 2020). Jika dilihat dari sudut pandang penggunaan teknologi informasi untuk e-government, yang paling krusial adalah mengadvokasi kebijakan pemerintah dan meningkatkan pengiriman layanan dengan tujuan mengurangi praktik korupsi, mendorong pertumbuhan pendapatan, meningkatkan transparansi, kenyamanan, serta memfasilitasi efisiensi finansial dalam sektor publik (Agbozo & Asamoah, 2019).

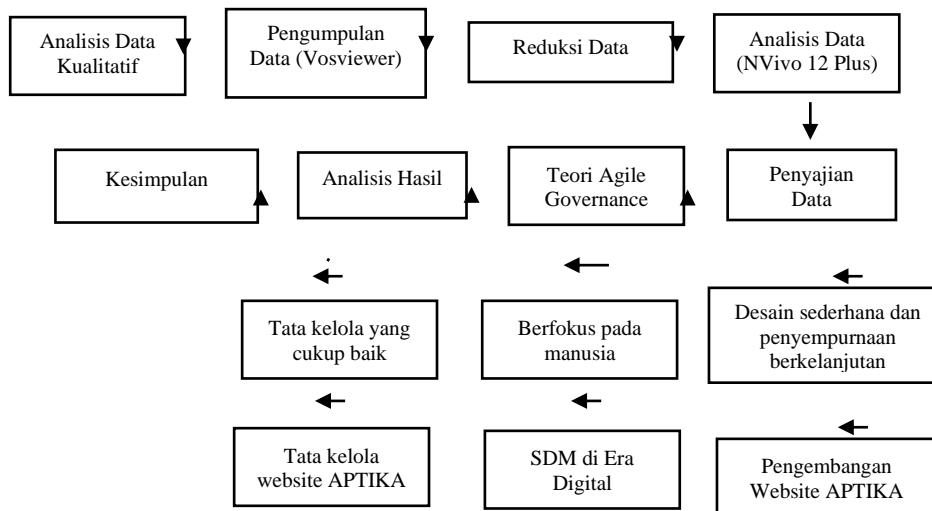
Dalam rangka pengembangan *Information and Communication Technology* (ICT) yang efektif, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia mendirikan Ditjen APTIKA. Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika (selanjutnya disebut Ditjen APTIKA) memiliki kewajiban dalam mengatur perumusan dan penerapan aturan di bidang Penata Kelolaan Aplikasi Informatika (Hidayat, 2023). Tugas ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 54 Tahun 2015 tanggal 4 Mei tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika. Keppres tersebut kemudian diterjemahkan menjadi peraturan menteri komunikasi dan informatika nomor 2016 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Kominfo yang mengatur kedudukan, tugas pokok, fungsi dan struktur manajemen umum APTIKA. Selain itu, Direktorat Jenderal Aplikasi juga memiliki peran penting dalam memastikan keamanan, integritas, dan integritas aplikasi komputer di sektor publik. (Indriyani Putri, 2019).

Dalam menjalankan tugasnya, Ditjen Aptika bertanggung jawab dalam pengelolaan dan penyediaan layanan melalui Website APTIKA (Kusdiantoro, 2019). Website Ditjen Aptika menjadi semakin penting dalam e-government. Layanan yang disediakan melalui website APTIKA dapat mencakup berbagai hal, seperti pengajuan permohonan administrasi, pendaftaran online, pelaporan masalah, informasi kebijakan, dan berbagai layanan publik lainnya (Rumata & Nugraha, 2020). Website ini juga sering digunakan sebagai Website untuk berkomunikasi antara

mengisi kekosongan yang ada, dengan fokus pada Teori Agile Governance dalam mengkaji Website Ditjen Aptika. Teori yang akan yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori *Agile Governance* tiga melalui indikator utama, yaitu tata kelola yang baik, berfokus pada manusia di Era Digital, serta desain sederhana dan penyempurnaan berkelanjutan (Luna, 2015). Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak positif Website Ditjen APTIKA terhadap pengembangan teknologi informasi dalam konteks pelayanan publik.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan tinjauan naratif. Menurut Gasparyan et al (2011), ulasan naratif adalah pendekatan terstruktur yang digunakan untuk menyajikan dan melakukan kajian komprehensif terhadap literatur yang ada pada topik penelitian tertentu. Sumber data yang digunakan adalah data website, artikel, paparan dari pemangku kebijakan, survey, buku, artikel maupun jurnal penelitian yang terkait dengan bidang kajian. Penelitian ini menggunakan teori *Agile Governance* untuk menganalisis dampak positif website Ditjen APTIKA. Selanjutnya penelitian ini menerapkan tiga indikator utama, yaitu tata kelola yang cukup baik, berfokus pada manusia, serta desain sederhana dan penyempurnaan berkelanjutan (Luna et al., 2015). Merujuk pada konsep teori tersebut, pembahasan akan dibagi menjadi tiga bagian utama: tata kelola website APTIKA, sumber daya manusia di Era Digital, dan pengembangan website APTIKA. Selain itu, alat visualisasi NVivo 12 Plus dan Vosviewer digunakan untuk memberikan analisis visual mengenai kemunculan kata kunci.



Gambar. 2 Tahapan Penelitian
(Sumber: Diolah oleh Penulis, 2024)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tata Kelola Website Aptika

Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal yang bertanggung jawab untuk menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan aplikasi informatika (Hidayat, 2023). Tugas utama Ditjen Aptika meliputi pengembangan dan pelaksanaan kebijakan nasional dalam hal pengelolaan aplikasi informatika, termasuk pengawasan dan evaluasi pelaksanaannya. Mereka juga bertugas dalam memberikan

bimbingan teknis kepada instansi pemerintah terkait dalam hal pengembangan, pengoperasian, dan pemeliharaan aplikasi informatika (Kusdiantoro, 2019). Dengan peran dan tanggung jawab tersebut, Ditjen Aptika menjadi pengawas dan pengatur yang penting dalam memastikan penata kelolaan yang efektif dan efisien dari aplikasi informatika di sektor publik. Mereka mengawasi implementasi langkah-langkah keamanan teknis, serta melakukan pemantauan dan penanganan terhadap risiko keamanan yang mungkin timbul (Rumata & Nugraha, 2020).

Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika (Ditjen Aptika) yang pada awalnya Ditjen Aplikasi Telematika (Ditjen Aptel) dibentuk untuk melakukan pengembangan *Information and Communication Technology* (ICT) yang efektif di Indonesia. TIK tidak dapat dipisahkan dari 3C, yaitu *communication*, *computer* dan *content* yang kemudian diluncurkan sebagai logo Kemkominfo dengan tiga huruf C bernuansa biru. Direktorat Jenderal Aplikasi dan Informatika (Ditjen Aptika) merupakan inovasi layanan publik yang dapat diakses melalui website resminya dengan mengakses link: <https://aptika.kominfo.go.id/>. Website ini menyediakan layanan dalam bentuk *virtual experience* dan *website konvensional*. Terdapat berbagai jenis opsi yang tersedia dalam website ini, diantaranya beranda, profil, informasi, publikasi, data aptika, kontak dan virtual tour.

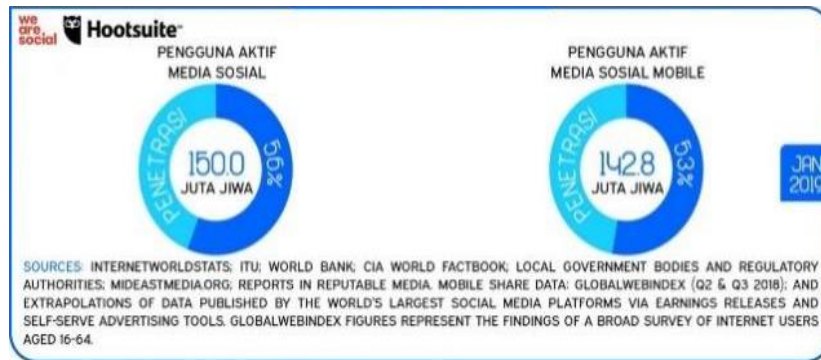


Gambar 3. Halaman Beranda

(Sumber: Website Ditjen APTIKA)

Berdasarkan Gambar 3 diatas, menunjukkan beberapa layanan yang tersedia dalam website tersebut, yaitu pengaduan konten negative, layanan aptika terintegrasi, dan cek rekening.id. Layanan ini memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses informasi dibidang teknologi dan informasi di Indonesia. Selain itu, website aptika menyediakan pula layanan pelaporan konten yang bersifat negative. Konten negatif yang dapat dilaporkan melalui e-Mail aduankonten@mail.kominfo.go.id atau web <https://aduankonten.id>. Informasi yang dapat dilaporkan, yaitu berita bohong, pornografi, sara/ujaran kebencian, narkoba, perjudian, penipuan, pishing/malware, terorisme/radikalisme, kekerasan dan pelanggaran haki. Selain itu, terdapat layanan lainnya yang tampil pada halaman utama, diantaranya berita, artikel, agenda kegiatan, publikasi, galeri foto twitter @ditjenaptika, GPR Kominfo, topik populer, alamat kantor, tentang Ditjen Aptika dan media sosial (Titter, Instagram, dan Youtube).

pengguna ponsel yang berjumlah 142,8 juta jiwa dengan penetrasi 53%. Temuan ini menggambarkan bahwa akses internet di Indonesia telah mencapai jumlah yang signifikan dan tersebar di seluruh wilayah. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan internet melalui perangkat mobile juga cukup tinggi, mengingat jumlah pengguna internet mobile mendekati jumlah total pengguna internet secara keseluruhan (Gambar 5).

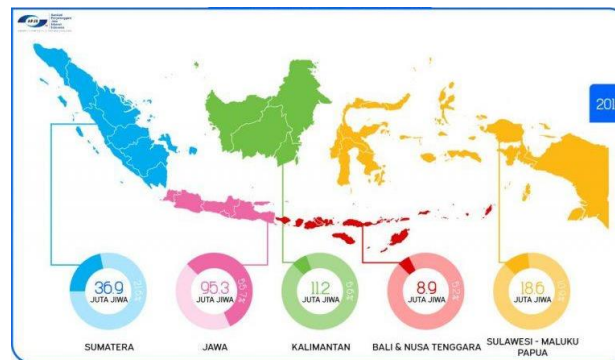


Gambar 5. Jumlah Pengguna Internet Aktif Indonesia (2019).

(Sumber: Kementerian Kominfo RI)

Ekosistem data terbuka yang berfungsi dengan baik adalah aksesibilitas dari perspektif teknis, hukum, dan organisasi (Welle Donker & van Loenen, 2017). Oleh karena itu, penting adanya kebijakan yang menetapkan konteks hukum, standar untuk memfasilitasi interoperabilitas data, dan jaringan yang stabil dan berkelanjutan bagi pengguna data. Berdasarkan hasil temuan, ekosistem data mengalami penetrasi yang tinggi dalam kategori internet dan penggunaan internet mobile yang mencerminkan ketersediaan data. *Ecosystem data* mencakup pengumpulan, penyimpanan, pengolahan, dan analisis data yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Dengan adanya tingkat penetrasi yang tinggi, terdapat peluang besar untuk mengumpulkan data dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, seperti e-government, layanan publik, dan inisiatif digital lainnya. Pemanfaatan solusi digital yang memanfaatkan data tersebut dapat mendorong inovasi, transformasi digital, dan memajukan ekosistem digital secara keseluruhan di Indonesia (Gambar 5).

Pertumbuhan penggunaan internet telah menjadi fenomena yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Internet bukan lagi sekadar alat untuk mengakses informasi, tetapi juga menjadi platform untuk berkomunikasi, belajar, berbelanja, dan bahkan bekerja (Khutkyy & Laureda, 2023). Penggunaan internet yang meluas telah memengaruhi berbagai aspek kehidupan. Berikut adalah data tentang tingkat penggunaan internet di Indonesia.

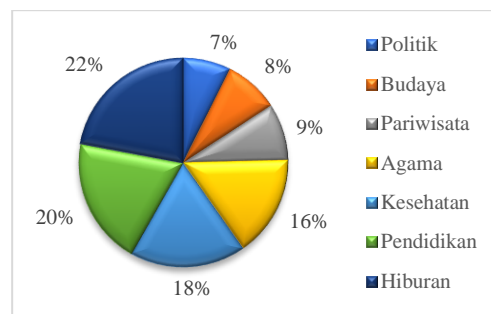


Gambar 6. Tingkat Penggunaan Internet di Indonesia
(Sumber: Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, 2018)

Gambar 6, menunjukkan hasil survey Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) mengungkapkan bahwa pengguna internet memiliki persentase paling tinggi di Indonesia adalah pulau Jawa dan Sumatera. Pulau Jawa mencatat jumlah pengguna internet terbanyak, dengan 95,3 juta jiwa atau sekitar 55,7% dari total pengguna internet di negara ini. Sementara itu, Sumatera menempati peringkat kedua dengan jumlah pengguna internet sebesar 36,9 juta jiwa, yang setara dengan 21,6% dari total pengguna internet di Indonesia. Sedangkan pulau Kalimantan memiliki 11,2 juta jiwa pengguna internet dengan tingkat penetrasi yang cukup tinggi, mencapai 66%. Di pulau Bali dan Nusa Tenggara, terdapat 8,9 juta jiwa pengguna internet dengan persentase penetrasi sebesar 52%. Sedangkan di wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua, jumlah pengguna internet mencapai 18,6 juta jiwa atau 10,9% dari total pengguna internet di Indonesia (Gambar 6).

Tingkat penetrasi internet yang tinggi dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) berdampak signifikan pada pelayanan sektor publik dengan meningkatkan akses informasi, transparansi, akuntabilitas, serta efisiensi pelayanan (Lima et al., 2022). Selain itu, TIK dapat digunakan untuk mengembangkan layanan kesejahteraan dan teknologi pendukung, memperbaiki kualitas hidup masyarakat, serta memajukan pemerintahan dalam era digital. Namun, temuan di atas mengungkapkan ketimpangan dalam distribusi pengguna internet di Indonesia. Pulau Jawa dan Sumatera menjadi pusat utama penggunaan internet. Informasi ini memiliki relevansi penting dalam konteks upaya meningkatkan aksesibilitas dan literasi digital di wilayah-wilayah dengan tingkat penetrasi internet yang masih rendah. Tindakan ini bertujuan untuk memastikan bahwa masyarakat di seluruh Indonesia dapat merasakan manfaat yang sama dari perkembangan teknologi digital (Gambar 6).

Di era digital saat ini, media online telah menjadi sumber utama informasi bagi masyarakat (Chen et al., 2021). Ketersediaan berbagai jenis konten di internet memungkinkan pengguna untuk mengakses pengetahuan, berita, dan hiburan dengan mudah dan cepat. Namun, kualitas dan manfaat dari informasi yang tersedia sangat bervariasi.

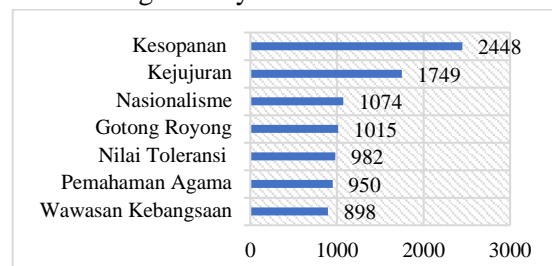


Gambar. 7 Informasi/Konten Bermanfaat di Media Online
(Sumber: Kementerian Kominfo RI, 2018)

Gambar 7 di atas, menunjukkan hasil analisis temuan mengenai informasi/konten bermanfaat di media online menunjukkan persebaran persentase yang berbeda untuk beberapa topik yang paling banyak dibahas dalam konten tersebut. Dalam analisis ini, terlihat bahwa topik hiburan mendapatkan persentase tertinggi sebesar 22%, diikuti oleh pendidikan (20%), kesehatan (18%), agama (16%), pariwisata (9%), budaya (8%), dan politik (7%). Temuan ini menunjukkan adanya kepentingan yang signifikan dalam menyajikan konten yang relevan dalam bidang hiburan, pendidikan, kesehatan, agama, pariwisata, budaya, dan politik. Dalam konteks ekosistem data, informasi mengenai topik-topik ini dapat memberikan kontribusi dalam pengumpulan data, analisis, pengembangan solusi digital, dan pengambilan keputusan yang berkelanjutan (Wretling & Balfors, 2021).

Data yang terkumpul dari konten-konten bermanfaat ini dapat menjadi sumber untuk menganalisis tren, preferensi, dan kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat di Indonesia. Hasil temuan menunjukkan adanya informasi yang relevan tentang hiburan dapat membantu dalam mengidentifikasi tren konsumsi dan kebutuhan pengguna dalam industri hiburan. Sementara itu, informasi tentang pendidikan, kesehatan, agama, dan pariwisata dapat memberikan wawasan yang berharga dalam pengembangan solusi digital yang dapat meningkatkan pelayanan dan kualitas hidup masyarakat. Pengumpulan data mengenai budaya dan politik juga penting untuk memahami dinamika masyarakat, preferensi politik, dan pengaruh kebijakan pemerintah. Dengan memanfaatkan ekosistem data ini, kita dapat mengambil langkah-langkah yang lebih efektif dalam mengembangkan inovasi, meningkatkan kualitas pelayanan, dan memberikan manfaat kepada masyarakat secara keseluruhan.

Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) telah mengalami peningkatan yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir, membawa dampak yang luas dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat (Prabandari, 2019). Berikut ini adalah gambar yang menunjukkan pengaruh penggunaan TIK di kalangan masyarakat.



Gambar. 8 Data Pengaruh Penggunaan TIK Masyarakat (2018)
(Sumber: Kementerian Kominfo RI, 2018)

Gambar 8, menunjukkan pengaruh penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) pada masyarakat, yaitu Wawasan Kebangsaan (898), Pemahaman Tentang Agama (950), Nilai Toleransi Antarumat Beragama (982), Gotong Royong (1015), Nasionalisme (1074), Kejujuran (1749), dan Kesopanan dalam Tingkah Laku (2448). Perubahan baik positif maupun negatif juga terjadi akibat penggunaan TIK dan internet. Persentase tertinggi terjadi pada kesopanan dalam tingkah laku, kejujuran dan gotong royong. Hasil temuan ini menunjukkan bahwa penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) memiliki dampak yang signifikan pada masyarakat dalam beberapa aspek. TIK juga berperan dalam penyediaan berita dan informasi, memungkinkan akses ke sumber daya akademis, serta memfasilitasi aktivitas penelitian.

Teknologi Informasi dan Komunikasi merupakan aspek integral dalam kehidupan modern, mengubah cara kita berinteraksi, bekerja, berkomunikasi, belajar, bersantai, dan menjalani sebagian besar aspek kehidupan sehari-hari dengan akses tak terbatas (Izdihar et al., 2022). Penggunaan TIK berkontribusi positif terhadap wawasan kebangsaan, pengetahuan dan pemahaman tentang agama, nilai toleransi antarumat beragama, gotong royong, nasionalisme, kejujuran, dan kesopanan dalam tingkah laku. Melalui akses mudah dan cepat terhadap informasi serta interaksi melalui TIK, masyarakat dapat memperluas pengetahuan mereka, memperkuat nilai-nilai sosial, dan meningkatkan partisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Temuan ini menunjukkan pentingnya pemanfaatan TIK dalam membangun masyarakat yang berwawasan, beragam, solidaritas, dan berperilaku positif, serta mendorong terciptanya harmoni dan kemajuan sosial di tingkat nasional.

Pengembangan Website APTIKA

Untuk memfasilitasi aksesibilitas data terbuka, pemerintah di seluruh dunia sedang mengembangkan website data terbuka (Welle Donker & van Loenen, 2017). Layanan Virtual Experience merupakan jenis layanan yang bertujuan untuk memberikan pengalaman interaktif dan imersif melalui Website virtual. Layanan ini memungkinkan pengguna untuk terlibat dalam lingkungan digital yang simulatif, seperti tur virtual, simulasi, atau pengalaman visual yang lebih mendalam. Sedangkan layanan Web Konvensional berfokus pada penyediaan informasi dan interaksi melalui situs web, yang mencakup berita, artikel, program, layanan, galeri, isu terkini, pengumuman, dan agenda kegiatan. Sejarah Aptika berfokus pada pengembangan aplikasi dan layanan informatika di Indonesia. Tugas dan fungsi Aptika meliputi pengembangan kebijakan, regulasi, dan pengawasan terkait teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di berbagai sektor. Aptika juga memiliki struktur organisasi yang melibatkan berbagai divisi dan unit kerja yang bertanggung jawab atas berbagai aspek pengembangan aplikasi dan layanan teknologi informasi melalui website Ditjen APTIKA (Tabel 1).

Tabel. 1 Layanan pada Website Ditjen Aptika

Pilihan	Layanan
Beranda	Virtual Experience dan Web Konvensional,
Profil	Sejarah Aptika, tugas dan fungsi, struktur organisasi, dan daftar nama pejabat Aptika
Informasi	berita, artikel, program, layanan, galeri, isu aptika, pengumuman dan agenda keguatan
Publikasi	Buku Aptika, dinamika data, dan laporan tahunan

Data Aptika	Internet dan media social, regulasi, infrastruktur TIK, aplikasi layanan publik, pengembangan SDM, kerjasama, komunitas TIK, pemeringkatan dan penghargaan
Kontak	Nomor fax dan telepon, email dan Website layanan publik
Virtual Tour	Tour Virtual Kantor Kominfo

(Sumber: Website Ditjen APTIKA, 2023)

Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika (APTIKA) memiliki kewajiban dalam mengatur perumusan dan penerapan aturan di bidang Penata Kelolaan Aplikasi Informatika (Hidayat, 2023). Hasil temuan menunjukkan layanan berita, artikel, program, layanan, galeri, isu Aptika, pengumuman, dan agenda kegiatan merupakan bagian dari upaya Aptika untuk menyediakan informasi dan pelayanan kepada masyarakat terkait perkembangan aplikasi dan layanan informatika. Buku Aptika, dinamika data, dan laporan tahunan merupakan produk yang diterbitkan oleh Aptika sebagai sumber informasi dan evaluasi terkait kinerja dan perkembangan dalam bidang aplikasi informatika (Tabel 1).

Ditjen APTIKA juga terlibat dalam regulasi terkait internet dan media sosial, pengembangan infrastruktur TIK, pengembangan aplikasi layanan publik, pengembangan sumber daya manusia, kerjasama dengan pihak terkait, pembentukan dan pengembangan komunitas TIK, serta pemeringkatan dan penghargaan untuk aplikasi dan layanan TIK yang berprestasi. Untuk informasi lebih lanjut, nomor fax dan telepon, email, dan Website layanan publik Aptika dapat dihubungi. Tour Virtual Kantor Kominfo merupakan layanan virtual yang memungkinkan pengguna untuk menjelajahi kantor Kominfo secara digital. Ini memberikan pengalaman visual yang interaktif melalui Website virtual, memperlihatkan lingkungan kantor, ruangan, dan fasilitas yang ada. Layanan ini bertujuan untuk memberikan wawasan tentang struktur dan lingkungan kerja di Kantor Kominfo.

Website Ditjen APTIKA berfungsi sebagai pusat informasi dan layanan terkait teknologi informasi dan komunikasi yang telah disediakan (Kusdiantoro, 2019). Penelusuran website APTIKA memungkinkan pengguna untuk mengakses berbagai informasi penting seperti regulasi, program pemerintah, berita terbaru, serta panduan dan sumber daya terkait TIK. Selain itu, website ini juga menyediakan fitur interaktif dan layanan online yang memudahkan masyarakat dan pemangku kepentingan dalam mendapatkan informasi dan berinteraksi dengan Ditjen APTIKA. Dengan desain yang *user-friendly* website APTIKA berperan penting dalam mendukung transparansi, efisiensi, dan keterbukaan informasi di bidang TIK di Indonesia.

Tabel. 2 Trend Topik Penelusuran

Trend	Topik	Penelusuran
1	Literasi Digital	253
2	RUU PDP	111
3	Perlindungan Data Pribadi	91
4	Transformasi Digital	78
5	Hoaks Covid-19	72
6	Virus Corona	64
7	SPBE	62

8	Smart City	55
9	Pusat Data Nasional	54
10	Startup Digital	53
11	UMKM Go Online	48
12	UMKM Digital	47
13	Kebocoran Data	47
14	Konten Negatif	46
15	Siberkreasi	40

(Sumber: Website Ditjen APTIKA, 2023)

Tabel 2, menunjukkan hasil temuan persebaran jumlah penelusuran terkait dengan topik-topik yang berbeda. Terdapat beberapa topik yang mendapatkan jumlah penelusuran yang lebih tinggi, seperti Literasi Digital (253), RUU PDP (111), Perlindungan Data Pribadi (91), Transformasi Digital (78), dan Hoaks Covid-19 (72). Data yang terkandung dalam topik ini dapat menjadi sumber informasi untuk memahami tren dan kebutuhan masyarakat terkait dengan literasi digital, kebijakan perlindungan data pribadi, transformasi digital, dan penyebaran hoaks terkait Covid-19. Ekosistem data dapat digunakan untuk mengumpulkan data terkait literasi digital, perlindungan data pribadi, dan transformasi digital dalam rangka meningkatkan pemahaman dan penerapan kebijakan yang relevan (Setiawan, 2018).

Selain itu, pengumpulan data terkait hoaks Covid-19 dapat membantu dalam upaya melawan penyebaran informasi yang salah dan mempromosikan informasi yang akurat dan dapat dipercaya (Liang, 2020). Selain topik yang mendapatkan jumlah penelusuran yang lebih tinggi, terdapat pula topik lainnya seperti *Smart City*, Pusat Data Nasional, *Startup Digital*, *UMKM Go Online*, dan Digitalisasi Sektor Strategis yang juga memiliki kaitan dengan ekosistem data. Informasi terkait smart city dan pusat data nasional dapat memberikan wawasan tentang penggunaan data dalam pengembangan kota cerdas dan pengelolaan data yang efektif. Sementara itu, topik terkait startup digital, *UMKM go online*, dan digitalisasi sektor strategis. Dalam konteks ekosistem data, hal tersebut dapat digunakan untuk analisis data lebih lanjut, pengembangan kebijakan yang relevan, pengambilan keputusan yang berdasarkan data, dan pengembangan solusi teknologi yang lebih baik sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat (Tabel 2).

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan dampak positif terhadap layanan website Ditjen APTIKA melalui pengembangan teknologi informasi dalam konteks pelayanan publik. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip yang ditemukan dalam teori Agile Governance, yang lebih menekankan pada peningkatan efisiensi dalam layanan publik. Hasil temuan menunjukkan bahwa tata kelola website Ditjen APTIKA merupakan upaya pemerintah dalam mengembangkan ekosistem data. Desain yang user-friendly berperan penting dalam mendukung transparansi, efisiensi, dan keterbukaan informasi. Data menjadi salah satu tema yang banyak dibahas dalam artikel berita di website tersebut. Hal ini menyoroti pentingnya peran data dalam ekosistem, di mana pengumpulan, pemrosesan, dan pengarsipan data merupakan komponen penting dalam pengembangan layanan publik. Selain itu, sumber daya manusia di era digital menunjukkan adanya penetrasi penggunaan internet yang tinggi, namun hanya Pulau Jawa dan Sumatera yang menjadi pusat utama penggunaan internet di Indonesia. Dari seluruh pengguna internet, 22% di antaranya lebih banyak mengakses konten hiburan, yang berdampak pada penurunan nilai-nilai

wawasan kebangsaan hingga hanya 898 akses saja. Dalam konteks ekosistem data, terdapat beberapa topik yang menjadi fokus dalam pengembangan website APTIKA, termasuk smart city, pusat data nasional, startup digital, UMKM go online, dan digitalisasi sektor strategis. Ekosistem data menjadi aspek penting dalam melahirkan solusi teknologi yang lebih baik sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat. Oleh karena itu, hasil studi ini berimplikasi dalam pemerataan akses internet, pengembangan inovasi digital, dan peningkatan mutu layanan publik melalui website APTIKA.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing atas bimbingan dan wawasan berharga sepanjang proses penelitian ini. Kami juga berterima kasih kepada Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang telah memberikan dukungan kepada Penulis. Semoga hasil penelitian ini memberikan kontribusi yang berarti bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

REFERENSI

- Agbozo, E., & Asamoah, B. K. (2019). The role of e-government systems in ensuring government effectiveness and control of corruption. *R-Economy*, 5(2), 53–60. <https://doi.org/10.15826/recon.2019.5.2.006>
- Akatkin, Y., & Yasinovskaya, E. (2020). Data-Driven Government in Russia: Linked Open Data Challenges, Opportunities, Solutions. *Communications in Computer and Information Science*, 1349(September 2021), 245–257. https://doi.org/10.1007/978-3-030-67238-6_18
- Akbar, P., Nurmandi, A., Irawan, B., & Loilatu, M. J. (2022). Research Trends in E-Government Interoperability: Mapping Themes and Concepts Based on The Sco-pus Database. *EJournal of EDemocracy and Open Government*, 14(2), 83–108. <https://doi.org/10.29379/jedem.v14i2.707>
- Alvarenga, A., Matos, F., Godina, R., & Matias, J. C. O. (2020). Digital transformation and knowledge management in the public sector. *Sustainability (Switzerland)*, 12(14). <https://doi.org/10.3390/su12145824>
- Anita Rahmah Fitria, R. G. P. (2021). *THE ROLE OF PUBLIC RELATIONS (PR) THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATICS IN DISSEMINATING THE CONTENT COMPLAINS PROGRAM*.
- Chen, C.-L., Lin, Y.-C., Chen, W.-H., Chao, C.-F., & Pandia, H. (2021). Role of government to enhance digital transformation in small service business. *Sustainability (Switzerland)*, 13(3), 1–26. <https://doi.org/10.3390/su13031028>
- Chung, C.-S., & Kim, S.-B. (2019). A comparative study of digital government policies, focusing on E-Government acts in Korea and the United States. *Electronics (Switzerland)*, 8(11). <https://doi.org/10.3390/electronics8111362>
- Correa-Ospina, M., Saxena, D., & Pinzón, B. H. D. (2021). Mechanisms underpinning the usage of e-government services by businesses: A proposal based on previous empirical research. *EJournal of EDemocracy and Open Government*, 13(2), 154–183. <https://doi.org/10.29379/jedem.v13i2.685>
- Cui, Y., Kara, S., & Chan, K. C. (2020). Manufacturing big data ecosystem: A systematic literature review. *Robotics and Computer-Integrated Manufacturing*, 62. <https://doi.org/10.1016/j.rcim.2019.101861>
- Debeljak, A., & Dečman, M. (2022). Digital Transformation of Slovenian Urban Municipalities:

- A Quantitative Report on the Impact of Municipality Population Size on Digital Maturity. *NISPAcee Journal of Public Administration and Policy*, 15(2), 25–51. <https://doi.org/10.2478/nispa-2022-0012>
- Gasparyan, A. Y., Ayvazyan, L., Blackmore, H., & Kitas, G. D. (2011). Writing a narrative biomedical review: Considerations for authors, peer reviewers, and editors. *Rheumatology International*, 31(11), 1409–1417. <https://doi.org/10.1007/s00296-011-1999-3>
- Hidayat, T. (2023). *STRATEGI KOMUNIKASI KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA (KEMKOMINFO RI) DALAM PENERAPAN PROGRAM LITERASI DIGITAL*. 29–31.
- Indriyani Putri, K. R. (2019). Perlindungan Konsumen dalam Jual Beli Emas Melalui Platform Digital “Tamasia.” *Acta Comitas*, 4(3), 465. <https://doi.org/10.24843/ac.2019.v04.i03.p11>
- Izdihar, S., Asfianur, F., Nurmandi, A., & Mutiarin, D. (2022). *Information Services Through Social Media in the Covid-19 Pandemic Era*. 382–388.
- Jack, J. (2018). E-government in Vanuatu: a whole-of-government approach. *Asia Pacific Journal of Public Administration*, 40(4), 228–234. <https://doi.org/10.1080/23276665.2018.1545354>
- Khutkyy, D., & Laureda, E. A. (2023). Internet Voting for Policy Proposals: Amplifying Open Government in Chile and Colombia. *EJournal of EDemocracy and Open Government*, 15(1), 48–72. <https://doi.org/10.29379/jedem.v15i1.791>
- Kusdiantoro, A. (2019). *LKP: Rancang Bangun Aplikasi Sharing Document Berbasis Website Aptika di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur*.
- Liang, F. (2020). COVID-19 and Health Code: How Digital Platforms Tackle the Pandemic in China. *Social Media and Society*, 6(3). <https://doi.org/10.1177/2056305120947657>
- Lima, D., Zego, E. P., & Rodrigues, J. (2022). DIGITAL TRANSFORMATION IN PUBLIC FINANCE: A PARADIGM THAT HAS CONTRIBUTED TO CABO VERDE’S GROWTH. In A. L., S. D., & Z. L. (Eds.), *ACM International Conference Proceeding Series* (pp. 570–572). Association for Computing Machinery. <https://doi.org/10.1145/3560107.3560198>
- Luna, A. J. H. de O. (2015). *Agile Governance Theory*. 601. <https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/15494>
- Luna, A. J. H. de O., Kruchten, P., & de Moura, H. P. (2015). *Agile Governance Theory: conceptual development*. 1–22. <http://arxiv.org/abs/1505.06701>
- Mergel, I., Edelman, N., & Haug, N. (2019). Defining digital transformation: Results from expert interviews. *Government Information Quarterly*, 36(4). <https://doi.org/10.1016/j.giq.2019.06.002>
- Morte-Nadal, T., & Esteban-Navarro, M. A. (2022). Digital Competences for Improving Digital Inclusion in E-Government Services: A Mixed-Methods Systematic Review Protocol. *International Journal of Qualitative Methods*, 21. <https://doi.org/10.1177/16094069211070935>
- Mutar, A. F., Abdullah, A. R., Jasim, O. M., Saare, M. A., & Lashari, S. A. (2022). A comprehensive method of e-government transition for viable development in Iraq. *Bulletin of Electrical Engineering and Informatics*, 11(4), 2388–2398. <https://doi.org/10.11591/eei.v11i4.3142>
- Muttaqin, M. I., & Permatasari, A. (2023). Agile Government: Langkah Strategis Pemerintah Negara Indonesia Dalam Menghadapi Ancaman Resesi Global 2023. *JIIP: Jurnal Ilmiah*

- Ilmu Pemerintahan*, 8(2), 187–201. <https://doi.org/10.14710/jiip.v8i2.18875>
- Nielsen, M. M., & Ali, W. K. M. (2021). Governing and Monitoring the Digital Transformation: Assessing the Qatari Experience since 2003. *ACM International Conference Proceeding Series*, 246–253. <https://doi.org/10.1145/3494193.3494227>
- Parra, R. D., & Libaque-Saenz, C. (2020). The influence of digital transformation of the peruvian public sector on citizen trust. *26th Americas Conference on Information Systems, AMCIS 2020*. <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85097714729&partnerID=40&md5=04e69671c7092986cb9bbc3782d8cf42>
- Prabandari, L. M. A. S. (2019). *Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bandung*.
- Rumata, V. M., & Nugraha, D. A. (2020). Rendahnya tingkat perilaku digital ASN kementerian kominfo: Survei literasi digital pada instansi pemerintah. *Jurnal Studi Komunikasi (Indonesian Journal of Communications Studies)*, 4(2), 467. <https://doi.org/10.25139/jsk.v4i2.2230>
- Setiawan, A. B. (2018). Policy Development Towards Application and Contents Service Providers on Digital Ecosystem Through Over the Top. *Jurnal Penelitian Pos Dan Informatika*, 8(2), 169. <https://doi.org/10.17933/jppi.2018.080206>
- Sidek, N., & Ali, N. B. (2019). Analysing the critical quality factors in IoT-based serviceimplementation: A systematic evaluation. *International Journal of Engineering and Advanced Technology*, 9(1), 2276–2281. <https://doi.org/10.35940/ijeat.A2631.109119>
- Welle Donker, F., & van Loenen, B. (2017). How to assess the success of the open data ecosystem? *International Journal of Digital Earth*, 10(3), 284–306. <https://doi.org/10.1080/17538947.2016.1224938>
- Wretling, V., & Balfors, B. (2021). Building institutional capacity to plan for climate neutrality: The role of local co-operation and inter-municipal networks at the regional level. *Sustainability (Switzerland)*, 13(4), 1–21. <https://doi.org/10.3390/su13042173>
- Yuliantini, L. S. (2023). *The Impact of the E-Government Development Index (EGDI) on the Worldwide Governance Indicator (WGI) in European Union Countries*. 7(2), 140–153.